IMPLEMENTASI PENJAMINAN HAK ANAK DAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rafik Patrajaya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
rafikpatrajaya@gmail.com

Abstract:

One of the interest point to study is how the positive law guarantee the right of family's law. This paper talk about some problems about the implementation of guarantee right primarily the law of family, Right should see the equal and same in family and social life as the important problem must be solved. As principle of marriages in The constitution No.1, 1974 chapter 31 clearly said that position between Husband and wife is same, it can be running in family and social life. Husband as the a leader of family meanwhile wife as a housewife, they has the right to be the subject in law. The other bill range clearly about caring The Kid's Right, it explains that the Kid must be cared and teach until they married or the live independent although their parents divorced. The Kids who is not 18 years old or never married, they are still under parents caring as long as the power is canceled yet. In this term, Parents have the right to vice their kids in all of law's activities out and in the justice. Event though, parents are canceled their power however they have to give the budget's caring to their kids.

Keywords: Right, Wife, Kids.

Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah banyak merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Diantara hak dan kewajiban suami istri terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu berangkat dari hadits-hadits Rasulullah menurut Imam Nawawi, setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah.¹

Mencermati hadits yang lain, kewajiban suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami adalah diberi sandang dan pangan, tidak dipukul wajah jika terjadi *nusyuz*, tidak diolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibenci istrinya, tidak menjauhi istrinya kecuali dalam rumah.

Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika datang dan pergi, menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, dan sebagainya.²

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri, maka diharapkan akan terjalin hubungan yang *sakinah matwaaddah, wa rahmah*.

Selain itu Undang-undang juga mengatur tentang hak anak dalam sebuah keluarga yang sudah termuat dalam pasal-pasal. Undang-undang ini menjamin hak anak, misalnya hak untuk diberi nafkah, diberi perlindungan dan lain-lain.

Dengan adanya Undang-Undang yang menjamin Hak anak dan hak istri, maka diharapkan akan terjadi ketentraman dalam hidup berkeluarga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pihak yang

¹ Teks ini terjemahan Forum Kajian Kitab Kuning terhadap teks kitab 'Uqud al-Lujjain. Lihat, FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Hlm 12-13

² *Ibid*, Hlm 61

berkewajiban, maupun pihak yang berhak.

Konsep Perkawinan Dalam Penjaminan Hak Istri dan Anak

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' : 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١﴾

Terjemahannya :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.³

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu berupa pernikahan.

Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai

³ Abidin, Slamet, Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 9-10

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hak Anak dan Istri Dalam Perundang-Undangan Mengenai Hukum Keluarga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴

Hak Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai 34.

Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

4

Ibid, Hlm. 157

Pasal 31:

- 1) *Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.*
- 2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- 3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.*

Pasal 32:

- 1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.*

Pasal 33:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34:

- 1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- 3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UU pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di masyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.⁵

Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 108 KUH perdata

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), Hlm. 91

dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin di anggap tidak mampu bertindak (*handelingsonbekwaam*), oleh karena itu hanya dengan bantuan pihak suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum.⁶ Mencermati hal ini apa yang dikatakan oleh Yahya Harahap tersebut dapat dibenarkan.

Beranjak dari Undang-undang Perkawinan seperti yang telah disebut pada pasal-pasal di atas, menurut Sayuti Thalib setidaknya ada lima hal yang sangat penting. Pertama, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang *ma'ruf* ke dalam rumah tangga ataupun ke luar masyarakat. Kedua, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga dan istri juga memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Ketiga, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam suatu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Keempat, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. Kelima, si istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal di atas adalah,

- a. Cinta mencintai satu dengan lainnya.
- b. Hormat menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya.
- d. Saling member dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 180-181

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm. 73-78

keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.

- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.⁸

Mencermati bunyi pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri tampaknya, kendatipun dalam hal kedudukan suami istri tidak setara, namun banyak pula penjelasan yang tidak berbeda dengan bunyi pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *ordonansi* perkawinan Kristen Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Suami istri harus setia satu sama dengan lain, saling tolong menolong dan saling membantu.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluannya menurut kedudukan dan kemampuannya.
- 3) Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- 4) Istri harus patuh, tinggal bersama suami dan wajib mengikuti suami dimana suami itu bertempat tinggal.

Jelaslah apa yang menjadi kewajiban suami, menjadi hak istri, begitu pula sebaliknya. Pada sisi lain antara keduanya ditemukan banyak persamaan-persamaan. Tidaklah berlebihan seperti apa yang dikatakan Lili Rasjidi, sebenarnya apa yang kembali diangkat oleh UU Perkawinan hanyalah merangkum atas apa-apa yang terdapat di dalam KUHPerdata, hukum adat, dan Hukum Islam.⁹

Hak Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini sangat rinci. Pembahasannya, dimulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), Hlm. 34

⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm. 182

suami terhadap istri yang lebih dari seorang, dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Pasal 77:

- 1) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.*
- 2) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

Pasal 78:

- 1) *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- 2) *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama.*

Pasal 79:

- 1) *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*
- 2) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- 3) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Pasal 80 (tentang kewajiban suami):

- 1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
- 2) *Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

- 3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- 4) *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*
 - a) *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.*
 - b) *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
 - c) *Biaya pendidikan bagi anak.*
- 5) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
- 6) *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.*
- 7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz.*

Pasal 81:

- 1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.*
- 2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- 3) *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- 4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

Pasal 82 :

- 1) *Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*
- 2) *Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.*

Pasal 83 (tentang kewajiban istri) :

- 1) *Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- 2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84

- 1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.*
- 2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat 4 a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Pasal-pasal KHI dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal, KHI mengadopsi pasal-pasal UUP seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di Undang-undang Perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami, nafkah, *kiswah*, dan kediaman atau sandang, pangan dan papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan istri dan anak serta pendidikan.

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selanjutnya, untuk masalah hak anak, UUP saat ini belum mengatur secara khusus tentang masalah anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun

1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁰ Di samping dua regulasi tersebut di atas masalah anak juga menjadi perhatian yang sangat serius, sehingga terbentuklah Undang-Undang Perlindungan anak No. 35 Tahun 2014. Dengan demikian anak tersebut sudah tentu mendapatkan perlindungan dan jaminan hak asasi bagi dirinya.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam Bab X mulai pasal 45-49 :

Pasal 45 :

- 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 46 :

- 1) *Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.*
- 2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Pasal 47 :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

¹⁰ Manan, Abdul, *Problematica Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 49 Thn. IX 2000, Hlm 69

Pasal 48 :

- 1) *Orang tua diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.*

Pasal 49 :

- 1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*
 1. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.*
 2. *Ia berkelakuan buruk sekali.*
- 2) *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterial.¹¹

Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

KHI dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab XIV pasal 98-106.

Pasal 98 :

- 1) *Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*

¹¹ *Ibid*, hlm 70

- 2) *Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*
- 3) *Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.*

Pasal 105 :

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*
- 3) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.*

Pasal 106 :

- 1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.*
- 2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.*

Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan, masalah ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan Pengadilan. Dengan demikian tanggung jawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan

ibu anak-anak tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.¹²

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-undang Perkawinan pada pasal 31-34 dan Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang di mata hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini sudah sangat jelas bagaimana Undang-Undang menjamin hak istri dalam kehidupan berumah tangga.

Kedua, tentang bagaimana Undang-Undang menjamin hak anak, walaupun masih belum secara khusus diatur. Tapi pada kenyataannya hak anak memang hak anak sudah dijamin oleh Undang-Undang. Seperti UUP Bab X pasal 45-49 yang intinya menjelaskan bahwa anak berhak atau wajib untuk dipelihara dan dididik sebaik-baiknya sampai ia kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, JakartaPT: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 189.

pengadilan. Meskipun orang tua dalam hal ini dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Dengan demikian, maka jelaslah sudah bagaimana Undang-Undang menjamin hak anak dalam kehidupan berkeluarga.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet, Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (JakartaPT: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Inpres No. 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982)
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)